

**PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) BAGI  
MASYARAKAT PEDALAMAN DAN PERBATASAN MELALUI LAYANAN  
SIPELANDUKILAT**

Muhammad Ilham Maulana  
Npp. 31.0706

*Asdaf Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara  
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Fakultas Perlindungan Masyarakat*

Email: Ilham @ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Irfan Uluputty, S.STP, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** *The issuance of E-KTP services in remote and isolated areas of Bulungan Regency still faces various challenges, particularly in the effectiveness of the SIPELANDUKILAT program implementation. **Purpose:** This study aims to understand and analyze how the SIPELANDUKILAT service provides E-KTP issuance services for the community in Tanjung Palas Utara District, especially in remote and isolated areas. **Method:** This research employs a qualitative approach with a case study method and an inductive approach. Data collection was conducted through interviews with 10 informants, direct observations, and documentation. **Results/Findings:** The findings indicate that the administrative services for population documentation in remote and isolated areas through the SIPELANDUKILAT program are still ineffective. Identified shortcomings include the lack of training provided to program implementers and the insufficiency in the quality and quantity of facilities and infrastructure. **Conclusion:** The Department of Population and Civil Registration of Bulungan Regency needs to promptly adapt to changes in data migration systems, improve and enhance the necessary facilities and infrastructure, and strengthen collaboration with regional government organizations or other private entities to improve services for communities in remote and isolated areas.*

**Keywords:** *Service, SIPELANDUKILAT, Administration Services, Population Administration*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pelayanan penerbitan E-KTP di daerah pedalaman dan terpencil di Kabupaten Bulungan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal efektivitas pelaksanaan program SIPELANDUKILAT. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelayanan SIPELANDUKILAT dalam memberikan layanan penerbitan E-KTP bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Palas Utara, khususnya di daerah pedalaman dan terpencil. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 10 informan, observasi langsung, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di wilayah pedalaman dan terpencil melalui program SIPELANDUKILAT masih tidak efektif. Beberapa kekurangan yang ditemukan antara lain kurangnya pelatihan bagi tenaga pelaksana program serta keterbatasan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. **Kesimpulan:** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan perlu segera menyesuaikan dengan perubahan sistem migrasi data, meningkatkan dan menambah sarana serta fasilitas yang diperlukan, serta memperkuat kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah atau pihak swasta lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah pedalaman dan terpencil.

**Kata Kunci:** Layanan, SIPELANDUKILAT, Pelayanan, Administrasi Kependudukan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada era digital saat ini, layanan administrasi kependudukan di Indonesia mengalami perubahan dan adaptasi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi (Japami, 2019). Kebijakan layanan administrasi kependudukan mencakup kegiatan pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat pusat. Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penertiban dan penataan dalam penerbitan dokumen data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi adminduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tentunya, pemerintah selalu mencoba untuk berinovasi dalam transformasi layanan administrasi kependudukan di Indonesia. Transformasi layanan administrasi kependudukan dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa inovasi dalam transformasi layanan Adminduk seperti sistem informasi terintegrasi, pelayanan online, identifikasi biometrik, pembaruan otomatis data kependudukan, pendekatan berbasis komunitas, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (Ramadhani, 2021).

Transformasi kebijakan pelayanan kependudukan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Gambar 1.1 menjelaskan tentang bagaimana perubahan kebijakan layanan Adminduk di Indonesia, yang dimulai dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) pada tahun 1995 hingga pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri membuat terobosan baru dalam transformasi layanan kependudukan dari era manual hingga ke era digital dengan meresmikan inovasi

terbaru seperti tanda tangan elektronik, revolusi layanan kertas putih, anjungan kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) mandiri, serta pemberian pengakuan identitas kependudukan yang berimbas besar terhadap dukcapil go to digital ke depannya (Sujani, 2019).

Inovasi dalam layanan adminduk memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemberian pengakuan identitas kependudukan. Pemberian pengakuan identitas kependudukan adalah inovasi yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses pendaftaran penduduk, meningkatkan keamanan data penduduk, dan juga menjadi salah satu komponen penting dalam mencapai perencanaan dan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan adminduk merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki sistem adminduk di Indonesia (Tefa, 2018).

Pentingnya program pelayanan adminduk bagi masyarakat Indonesia adalah dapat menunjang proses pembangunan negara dan juga memberikan pengakuan hukum atas identitas individu (Mulianingsih, 2022). Dokumen kependudukan yang sah dan resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan akta perkawinan menjadi bukti legalitas untuk berbagai urusan administratif seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), pembukaan rekening bank, pendaftaran sekolah, pendaftaran pekerjaan, dan lain sebagainya. Pelayanan adminduk juga berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Data kependudukan digunakan untuk menyusun daftar pemilih dan memastikan bahwa setiap hak warga negara terdaftar dengan benar.

Pada pelayanan adminduk di wilayah pedalaman dan perbatasan memiliki data dan fakta seperti aksesibilitas yang terbatas. Mengapa demikian? Karena wilayah pedalaman dan perbatasan sangat sulit diakses dengan infrastruktur yang masih terbatas. Kemudian juga adanya keterbatasan teknologi di daerah pedalaman; akses ke teknologi dan koneksi internet mungkin terbatas, yang menjadi hambatan untuk penggunaan sistem Adminduk secara daring. Selanjutnya, Nurrahman et al. (2022) menjelaskan pertumbuhan penduduk di wilayah pedalaman dan perbatasan mengalami peningkatan yang pesat, terutama dipengaruhi oleh migrasi lintas batas. Terakhir, keterkaitan dengan negara tetangga di mana wilayah perbatasan sering memiliki hubungan erat dengan negara tetangga, memerlukan kerja sama lintas batas dalam hal adminduk dan pertukaran data.

Penerapan pelayanan administrasi kependudukan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia telah mengalami keberhasilan dalam melayani masyarakat. Adapun beberapa kabupaten/kota yang memiliki program pelayanan adminduk yang efektif dalam membantu sektor pelayanan publik. Pertama, Program “SAD TO HAPPY” di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, di mana program layanan Adminduk kebanggaan masyarakat Kabupaten Dharmasraya ini menerapkan konsep membangun komitmen dengan kepala wilayah setempat dengan cara memberikan sosialisasi serta berkoordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis yang peduli dengan Suku Anak Dalam (SAD). Melalui LSM dan aktivis ini, SAD mendapat pemahaman tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi mereka. Setelah itu dilakukan perekaman data kependudukan kepada SAD dengan menggunakan pendekatan yang persuasif dan partisipatif. Kedua, program “SABTU TUNTAS” di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Program Adminduk favorit masyarakat Kabupaten Magetan ini sudah dinilai efektif karena sudah sesuai dengan tujuan awal yaitu mendekatkan dan memudahkan pelayanan adminduk kepada masyarakat desa. Selain itu, program ini telah mendukung program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi) dan terjadi peningkatan

kualitas pelayanan administrasi. Yang terakhir adalah program “ONE DAY SERVICE” di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Program unggulan ini memiliki konsep percepatan pembuatan akta kelahiran yang bekerja sama langsung dengan rumah sakit dalam kurun waktu penerbitan selama satu hari. Program ini dinilai efektif karena terjadi peningkatan jumlah cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Tabanan.

Namun, ada juga program layanan Adminduk yang dinilai belum efektif, contohnya seperti program pelayanan “KOLABORASI” adminduk di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini dinilai belum efektif karena pada faktor ketepatan waktu terdapat hambatan dalam mengurus akta kelahiran seperti koneksi jaringan yang tidak stabil dan sarana prasarana yang kurang mendukung. Kemudian, program “AKU WARAS” di Kota Denpasar Provinsi Bali juga dinilai belum efektif karena tujuan program yang tidak memenuhi syarat, pelayanan yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya tidak melebihi dari 2 hari. Sosialisasi program juga belum bisa dikatakan efektif karena sosialisasi belum dilaksanakan secara maksimal, hanya dilakukan sekali dengan menyampaikan kepada satu perwakilan dari tiap kecamatan di Kota Denpasar.

Pada beberapa kasus seperti Pratama (2022) menjelaskan penerapan program pelayanan Adminduk di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program pelayanan adminduk di wilayah pedalaman dan perbatasan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti terjalannya kerja sama dengan aktivis, pemimpin daerah setempat, maupun instansi yang mendukung jalannya program tersebut. Faktor yang biasanya belum bisa dicapai oleh suatu program adalah ketepatan waktu, tidak sesuai SOP, dan sosialisasi program yang belum maksimal.

Pentingnya penerapan program pelayanan Adminduk di wilayah pedalaman dan perbatasan tidak luput dari tujuan utama yakni untuk menunjang pembangunan negara dan terkhususnya pembangunan sistem pemerintahan di wilayah pedalaman dan perbatasan (Rahmadanik, 2021). Pelaksanaan program Adminduk tersebut menjadi titik terang bagi masyarakat dalam melengkapi dokumen kependudukan sebagai syarat sah legalitas kependudukan di Indonesia. Dengan adanya dokumen kependudukan yang lengkap, akan terbentuk data identitas individu, Nomor Induk Keluarga (NIK), data keluarga, data kewarganegaraan, data biometrik, data kelahiran dan kematian, serta data perkawinan dan perceraian yang sah.

Langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan program pelayanan Adminduk di wilayah pedalaman dan perbatasan adalah dengan memperluas aksesibilitas infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang memadai untuk mencapai daerah pedalaman dan perbatasan. Pemerintah juga melakukan kolaborasi dengan lembaga swasta dan organisasi internasional untuk memperkuat layanan adminduk di wilayah pedalaman dan perbatasan, menghadirkan sumber daya, pelatihan, dan teknologi yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga harus memprioritaskan perencanaan kebijakan yang responsif terhadap penanganan dan pengelolaan pengaduan penduduk di wilayah pedalaman dan perbatasan serta mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan konteks khusus yang dihadapi.

Provinsi Kalimantan Utara, yang baru diresmikan pada tanggal 22 April 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, memiliki masalah tersendiri yaitu berbatasan langsung dengan negara tetangga. Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa kabupaten/kota dengan posisi yang strategis yang menjadikan daerah tersebut sebagai halaman terdepan dari berbagai aktivitas perekonomian lintas batas atau antar negara sehingga

perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini menjadi dasar untuk pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap daerah tersebut, terutama dalam hal kepemilikan dokumen adminduk yang merupakan identitas jati diri penduduk. Adanya pemukiman masyarakat yang masih berada di pedalaman dan perbatasan yang secara lokasi geografis sangat jauh dari jangkauan pusat pelayanan ibukota kabupaten. Beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Inovasi dalam pelayanan Adminduk untuk menunjang program percepatan pengurusan dokumen kependudukan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan adalah program “Pelayanan Perekaman Mobile”.

Program “Pelayanan Perekaman Mobile” merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan perekaman data kependudukan. Program ini dirancang untuk menjangkau daerah-daerah pedalaman dan perbatasan yang sulit diakses dengan infrastruktur yang terbatas. Tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perjalanan ke desa-desa terpencil dengan membawa peralatan perekaman data kependudukan, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke pusat pelayanan di ibukota kabupaten.

Keberhasilan program “Pelayanan Perekaman Mobile” ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, peningkatan cakupan perekaman data kependudukan di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan adminduk kini dapat dengan mudah melakukan perekaman data kependudukan di desa mereka. Kedua, efisiensi waktu dan biaya. Dengan mendekatkan layanan ke masyarakat, waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan menjadi lebih efisien. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Melalui sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan program perekaman mobile, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah.

Selain program “Pelayanan Perekaman Mobile”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan juga melakukan inovasi lainnya seperti “Pelayanan Terintegrasi” di mana masyarakat dapat mengurus beberapa jenis dokumen kependudukan sekaligus dalam satu kali kunjungan. Misalnya, masyarakat dapat mengurus akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan KTP dalam satu waktu yang sama. Inovasi ini sangat membantu masyarakat dalam menghemat waktu dan biaya.

Keberhasilan program pelayanan Adminduk di Kabupaten Nunukan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang memiliki tantangan serupa. Sarifah et al. (2021) berpendapat dengan inovasi yang tepat dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, layanan Adminduk dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah pedalaman dan perbatasan. Pelaksanaan program Adminduk yang efektif di daerah-daerah tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara secara keseluruhan dengan menyediakan data kependudukan yang akurat dan terpercaya untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti penerapan KTP elektronik dan program Sipelandukilat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman mengenai implementasi dan efektivitas program ini di daerah pedalaman dan perbatasan. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada daerah perkotaan dengan infrastruktur yang lebih baik, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan tantangan unik yang dihadapi oleh daerah terpencil. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam literatur yang perlu diisi dengan studi yang secara khusus menyoroti kondisi dan kebutuhan spesifik dari wilayah-wilayah yang kurang berkembang ini.

Selain itu, meskipun ada penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan program inovasi, sebagian besar studi tersebut kurang mendalam dalam menganalisis faktor-faktor budaya dan sosial yang berperan dalam penerimaan dan keberlanjutan inovasi teknologi. Penelitian ini seringkali tidak mempertimbangkan bagaimana resistensi budaya terhadap perubahan dan aversi risiko dapat menghambat implementasi program inovatif di daerah terpencil. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan analisis faktor teknis, sosial, dan budaya dalam studi inovasi pelayanan publik.

Lebih lanjut, ada kekurangan dalam penelitian yang mengeksplorasi solusi konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sebagian besar studi berhenti pada identifikasi masalah tanpa memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara layanan public (Zulfikar et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan tidak hanya mengidentifikasi dan menganalisis masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Sipelandukilat di daerah pedalaman dan perbatasan.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi inovasi dalam layanan administrasi kependudukan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di daerah pedalaman dan perbatasan. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai keberhasilan, tantangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi di berbagai wilayah.

Penelitian pertama oleh Ahmad dan Rahman (2022) berfokus pada inovasi layanan administrasi kependudukan melalui program Sipelandukilat di daerah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara. Penelitian ini menemukan bahwa program Sipelandukilat berhasil meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan administrasi, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jaringan internet dan resistensi budaya terhadap perubahan. Studi ini menyoroti pentingnya dukungan finansial dan demografis dalam pengembangan inovasi serta perlunya strategi untuk mengatasi faktor penghambat seperti aversi risiko dan ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan.

Penelitian kedua oleh (Sitti, 2015) membahas implementasi program Sipelandukilat Smart dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Penelitian ini menyoroti bagaimana kemajuan teknologi telah mengubah cara kerja administrasi kependudukan dari manual menjadi otomatis, yang mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi data.

Program ini juga membantu masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dengan lebih cepat dan efisien, menunjukkan dampak positif teknologi digital dalam administrasi publik.

Penelitian ketiga oleh Dewi, Harjoyo, dan Irawan (2020) mengkaji pelayanan proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem aplikasi SIAK telah membantu dalam pengelolaan data kependudukan, masih terdapat masalah dalam hal keterbatasan blanko KTP-el yang menyebabkan keterlambatan penerbitan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya konsep layanan One Day Service Catpil untuk mempercepat proses penerbitan KTP-el dan memberikan solusi terhadap kendala keterlambatan tersebut.

Penelitian keempat oleh Yadisar (2020) mengevaluasi sistem pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dilaksanakan di Universitas Kapuas Sintang. Penelitian ini menemukan bahwa sistem prosedur administrasi kependudukan yang telah berjalan baik secara manual maupun online telah membantu dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan data untuk pembangunan. Namun, penelitian ini menekankan perlunya kebijakan yang tanggap terhadap norma lokal serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai tata cara pembuatan e-KTP.

Penelitian kelima oleh (Wulandari dan Widowati, 2023) meneliti implementasi program Sipelandukilat dalam meningkatkan pelayanan publik di wilayah perbatasan dan pedalaman. Studi ini menekankan bahwa pelayanan publik yang merata merupakan amanah Undang-Undang, dan program Sipelandukilat telah membantu menyediakan layanan kependudukan yang lebih baik di daerah yang sulit dijangkau. Penelitian ini juga menyoroti perlunya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk keberhasilan program ini.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan menggali lebih dalam implementasi program Sipelandukilat dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan di daerah pedalaman dan perbatasan yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya. Studi ini tidak hanya mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi program ini, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor unik yang mendukung dan menghambat inovasi di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Temuan ini memberikan wawasan baru mengenai dinamika implementasi inovasi di daerah terpencil, yang seringkali diabaikan dalam literatur.

Selain itu, penelitian ini memperkenalkan perspektif baru dalam penggunaan teknologi digital dan otomatisasi dalam administrasi kependudukan. Dengan mengkaji berbagai aspek dari penggunaan sistem informasi terintegrasi hingga teknologi biometrik, penelitian ini menunjukkan bagaimana teknologi canggih dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan klasik dalam administrasi kependudukan, seperti keterbatasan akses dan akurasi data. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur mengenai transformasi digital dalam sektor publik.

Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan analisis mendalam tentang dampak sosial dan budaya dari penerapan inovasi teknologi dalam layanan publik. Dengan mengidentifikasi resistensi budaya dan aversi risiko sebagai faktor penghambat utama, studi ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam implementasi inovasi teknologi. Temuan ini mendorong pengembangan kebijakan

yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, yang dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam merancang program-program inovatif di masa depan.

### **1.5. Tujuan.**

Tujuan utama dari transformasi layanan administrasi kependudukan di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah berupaya untuk mempercepat proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan. Inovasi seperti sistem informasi terintegrasi, pelayanan online, dan identifikasi biometrik diharapkan dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan, sekaligus meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan.

Selain meningkatkan efisiensi, transformasi layanan administrasi kependudukan juga bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan data kependudukan. Dengan adanya sistem yang lebih transparan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dan memantau status pengurusan dokumen mereka. Hal ini juga membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi kependudukan. Selain itu, keterbukaan data ini memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data yang akurat dan terkini.

Tujuan lainnya adalah untuk memastikan inklusi dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah pedalaman dan perbatasan. Program-program seperti "Pelayanan Perekaman Mobile" dan "Pelayanan Terintegrasi" dirancang untuk menjangkau masyarakat di daerah yang sulit diakses, sehingga mereka dapat memperoleh dokumen kependudukan yang sah tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Dengan demikian, transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menginvestigasi implementasi layanan SIPELANDUKILAT dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di daerah pedalaman dan perbatasan, khususnya di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti, yang melibatkan analisis yang terperinci tentang bagaimana layanan ini diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mencakup penggunaan konsep layanan publik menurut Parasuraman, yang terdiri dari lima dimensi: keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Konsep ini digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi kualitas layanan administrasi kependudukan yang diberikan melalui SIPELANDUKILAT. Data operasionalisasi ini akan diambil

dari berbagai sumber termasuk wawancara dengan pejabat di Disdukcapil, observasi langsung fasilitas layanan, dan analisis dokumen terkait.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan informan terpilih yang memiliki pengetahuan yang relevan, seperti pejabat struktural di Disdukcapil, petugas pelaksana layanan SIPELANDUKILAT, dan masyarakat yang mengikuti program penerbitan E-KTP. Sementara itu, data sekunder akan diperoleh dari dokumentasi resmi terkait prosedur operasional standar (SOP) dan catatan administrasi kependudukan di Kabupaten Bulungan.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini akan menggunakan teknik observasi langsung untuk mengamati fasilitas sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan sosialisasi terkait peningkatan layanan di Disdukcapil Kabupaten Bulungan. Observasi ini penting untuk mendapatkan data mengenai kondisi nyata dari layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data akan mencakup pemilihan data yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk disajikan dalam bab hasil penelitian. Penelitian ini juga akan menggunakan triangulasi data untuk memvalidasi hasil dari berbagai sumber data yang digunakan, yang kemudian akan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan yang tepat.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dengan jadwal penelitian yang sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan. Waktu yang diperlukan akan disesuaikan dengan tahapan pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian.

Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi dan efektivitas layanan administrasi kependudukan melalui SIPELANDUKILAT di daerah pedalaman dan perbatasan, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan layanan publik dalam konteks ini.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen identitas penting yang menunjukkan bahwa seseorang terdaftar sebagai penduduk di suatu wilayah. E-KTP, yang dilengkapi dengan chip elektronik, memberikan identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pada konteks ini, Kabupaten Bulungan mengimplementasikan layanan SIPELANDUKILAT untuk memfasilitasi penerbitan E-KTP bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan.

#### **1. Reliabilitas Pelayanan Penerbitan E-KTP**

Reliabilitas pelayanan menggambarkan seberapa jauh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dapat memberikan pelayanan penerbitan E-KTP melalui layanan SIPELANDUKILAT sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keandalan ini merupakan tolok ukur penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pedalaman dan perbatasan.

Dalam konteks ketelitian pelayanan, pegawai Dukcapil Kabupaten Bulungan sangat menekankan pada aspek ini. Ketelitian dalam proses penerbitan E-KTP sangat penting mengingat kartu identitas ini merupakan dokumen yang berhubungan langsung dengan identitas personal dan data sensitif individu. Para pegawai terlatih untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penerbitan E-KTP dilakukan dengan akurat, termasuk verifikasi data, perekaman sidik jari, dan pengambilan foto. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan yang dapat berpotensi merugikan pemohon di masa depan.

Standar pelayanan juga menjadi landasan penting dalam menjaga keandalan pelayanan. Dukcapil Kabupaten Bulungan telah menerapkan standar yang sesuai dengan regulasi terkait, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan. Standar ini mencakup prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam penerbitan E-KTP, termasuk penggunaan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi.

Kemampuan dalam mengoperasikan alat bantu juga menjadi faktor pendukung reliabilitas pelayanan. Pegawai Dukcapil Kabupaten Bulungan telah terlatih dalam menggunakan alat-alat modern yang mendukung proses pelayanan, seperti mesin pencetak E-KTP dan sistem informasi untuk manajemen data penduduk. Penggunaan alat bantu ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan yang dapat terjadi selama proses penerbitan.

## **2. Daya Tanggap Pelayanan Oleh Pegawai**

Daya tanggap pelayanan mencerminkan sejauh mana para pegawai Dukcapil Kabupaten Bulungan dapat merespons kebutuhan dan permintaan masyarakat dengan tepat waktu dan efisien. Dalam konteks penerbitan E-KTP melalui layanan SIPELANDUKILAT, penting untuk memastikan bahwa setiap pemohon mendapatkan perhatian yang memadai serta penyelesaian yang cepat terhadap setiap proses administratif yang mereka ajukan.

Pelayanan yang merata kepada semua lapisan masyarakat merupakan prinsip utama dalam menjaga daya tanggap yang baik. Dukcapil Kabupaten Bulungan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan E-KTP, baik dari segi geografis, sosial, maupun ekonomi. Ini dilakukan dengan menjaga konsistensi dalam proses pelayanan, termasuk memberikan akses informasi yang sama kepada semua warga masyarakat.

Efisiensi dalam pelayanan juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan daya tanggap. Meskipun jumlah pemohon penerbitan E-KTP melalui layanan SIPELANDUKILAT mungkin beragam setiap harinya, Dukcapil Kabupaten Bulungan telah mengembangkan sistem yang mampu menangani volume pengajuan dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Pengaturan antrian dan pengelolaan waktu pelayanan merupakan strategi yang diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pemohon dapat dilayani dengan efisien.

## **3. Jaminan Untuk Masyarakat**

Jaminan dalam pelayanan penerbitan E-KTP melalui layanan SIPELANDUKILAT mencakup aspek biaya, kemudahan akses, dan keamanan data. Pemerintah Kabupaten Bulungan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara gratis kepada masyarakat, termasuk dalam proses penerbitan E-KTP. Biaya pengurusan dan administrasi yang biasanya dikenakan pada layanan

serupa di tempat lain dihapuskan untuk memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh identitas resmi.

Kemudahan akses juga menjadi prioritas dalam jaminan pelayanan. Dukcapil Kabupaten Bulungan telah menawarkan layanan SIPELANDUKILAT sebagai solusi untuk mempermudah masyarakat pedalaman dan perbatasan dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan. Melalui portal online dan sistem informasi yang terintegrasi, masyarakat dapat mengakses informasi, memantau status pengajuan, dan mendapatkan bantuan langsung dari petugas tanpa harus datang secara langsung ke kantor.

Keamanan data merupakan bagian integral dari jaminan pelayanan. Dukcapil Kabupaten Bulungan telah melengkapi sistem penerbitan E-KTP dengan teknologi yang memadai untuk melindungi data pribadi masyarakat dari potensi ancaman keamanan. Langkah-langkah seperti enkripsi data dan akses terbatas hanya kepada pihak yang berwenang menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan dan disimpan selama proses penerbitan E-KTP tetap aman dan terlindungi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip reliabilitas, daya tanggap, dan jaminan pelayanan, Dukcapil Kabupaten Bulungan telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan E-KTP bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan melalui layanan SIPELANDUKILAT. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Melalui pendekatan yang holistik dan terpadu, Dukcapil Kabupaten Bulungan terus berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata kepada semua warganya.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian ini, temuan utama mengenai pelayanan penerbitan E-KTP melalui layanan SIPELANDUKILAT menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya sering kali menyoroti tantangan dalam aksesibilitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi layanan SIPELANDUKILAT telah berhasil mengatasi banyak dari tantangan tersebut dengan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, serta mengurangi disparitas geografis dalam mendapatkan E-KTP.

Selain itu, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang mungkin menyoroti masalah birokrasi dan lambatnya respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa Dukcapil Kabupaten Bulungan telah meningkatkan daya tanggap pelayanannya. Hal ini tercermin dari implementasi sistem antrian dan teknologi informasi yang mempercepat proses administrasi. Hasilnya, waktu tunggu pemohon dapat diminimalkan, dan pemrosesan data menjadi lebih efisien, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan administrasi kependudukan.

Adapun perbandingan lain dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal keamanan data. Penelitian sebelumnya mungkin telah menyoroti kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi yang terkait dengan penerbitan E-KTP. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa Dukcapil Kabupaten Bulungan telah menerapkan langkah-langkah yang lebih canggih dalam perlindungan data, seperti

enkripsi dan akses terbatas, untuk memastikan keamanan informasi sensitif masyarakat. Ini mengurangi risiko potensial terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data, memberikan keyakinan tambahan kepada masyarakat akan integritas proses penerbitan E-KTP.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui layanan SIPELANDUKILAT, tetapi juga memberikan perbandingan yang jelas dengan tantangan dan solusi yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk rekomendasi kebijakan dan pengembangan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di daerah pedalaman dan perbatasan.

### **3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dalam penelitian ini, selain temuan utama terkait dengan pelayanan penerbitan E-KTP melalui layanan SIPELANDUKILAT, terdapat beberapa temuan menarik lain yang patut dibahas. Pertama, penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi teknologi dalam administrasi kependudukan dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Sistem SIPELANDUKILAT memungkinkan integrasi data yang lebih baik antara berbagai unit kerja dalam Dukcapil Kabupaten Bulungan, mengurangi kemungkinan kesalahan input data dan duplikasi data. Hal ini tidak hanya mengoptimalkan waktu pemrosesan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keakuratan informasi pribadi mereka dalam E-KTP.

Kedua, temuan menarik lainnya adalah adopsi teknologi sebagai faktor kunci dalam mengatasi hambatan geografis dan demografis. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa SIPELANDUKILAT memungkinkan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau untuk mendapatkan layanan E-KTP dengan lebih mudah. Dengan adanya aksesibilitas yang ditingkatkan melalui teknologi, proses administrasi kependudukan dapat merata dan inklusif bagi semua warga negara, tanpa memandang lokasi atau kondisi geografis mereka.

Selain itu, temuan menarik lainnya adalah peran penting partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan efektivitas layanan publik. Melalui penggunaan SIPELANDUKILAT, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pengajuan dan pemrosesan E-KTP mereka. Dengan adanya feedback langsung dari pemohon, Dukcapil Kabupaten Bulungan dapat terus memperbaiki dan menyesuaikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan demikian, temuan-temuan menarik ini tidak hanya memberikan wawasan tambahan mengenai potensi dan manfaat teknologi dalam administrasi kependudukan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya inklusivitas dan partisipasi masyarakat dalam proses transformasi digital pemerintahan. Implikasi dari temuan-temuan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

## **IV. KESIMPULAN**

Dalam kesimpulan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa layanan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan E-KTP melalui SIPELANDUKILAT di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, telah memberikan kontribusi positif yang signifikan. Temuan menunjukkan bahwa pelayanan tersebut dinilai berhasil berdasarkan beberapa kriteria evaluasi, seperti reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik.

Pertama, tingkat reliabilitas layanan SIPELANDUKILAT dinilai baik karena mampu memberikan hasil penerbitan E-KTP yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen Disdukcapil Kabupaten Bulungan dalam menjaga standar pelayanan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan di daerah pedalaman dan perbatasan.

Kedua, daya tanggap pelayanan yang baik juga menjadi sorotan penting, di mana pegawai Disdukcapil mampu memberikan respon yang efektif dan memuaskan terhadap keinginan serta kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya memberikan pelayanan yang cepat dan efisien demi kepuasan pengguna layanan.

Ketiga, jaminan yang diberikan melalui SIPELANDUKILAT dinilai sangat baik karena berhasil menyediakan kepastian terhadap tercetaknya E-KTP masyarakat. Ini berkontribusi dalam memastikan kelengkapan dokumen kependudukan di wilayah yang sulit dijangkau, meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Meskipun demikian, terdapat juga temuan yang menunjukkan bahwa bukti fisik dari layanan SIPELANDUKILAT masih perlu perbaikan. Kurangnya fasilitas pendukung di wilayah pedalaman dan perbatasan menjadi hambatan dalam optimalisasi proses penerbitan E-KTP. Disdukcapil Kabupaten Bulungan perlu meningkatkan perhatian terhadap perawatan aset dan inventaris layanan administrasi kependudukan untuk mengatasi kendala ini.

Sebagai saran untuk masa depan, penelitian ini menyarankan Disdukcapil Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan sarana prasarana layanan SIPELANDUKILAT, lebih giat dalam sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan, terutama penerbitan E-KTP. Selain itu, perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai dan memperhatikan tingkat pendidikan mereka guna menjaga kualitas dan konsistensi pelayanan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan di daerah pedalaman dan perbatasan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung integrasi masyarakat dalam administrasi negara secara lebih efektif dan inklusif.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan implikasinya. Pertama, batasan geografis yang fokus pada Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, membatasi generalisasi temuan untuk wilayah geografis lain yang mungkin memiliki konteks sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang berbeda. Kedua, terbatasnya waktu penelitian mungkin mempengaruhi kedalaman analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas layanan SIPELANDUKILAT secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan data historis dan perbandingan dengan periode sebelumnya dapat mempengaruhi pemahaman terhadap perubahan dan perkembangan layanan administrasi kependudukan di daerah tersebut.

### **Arah Masa Depan Penelitian (Future Work)**

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meluaskan cakupan geografis sehingga dapat membandingkan berbagai konteks regional dalam implementasi layanan administrasi kependudukan. Penelitian masa depan juga dapat lebih mendalami aspek teknologi dan inovasi dalam penerbitan E-KTP, seperti integrasi dengan sistem digital yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Selain itu, akan bermanfaat untuk menginvestigasi lebih lanjut tentang dampak sosial dan ekonomi dari akses yang lebih mudah terhadap dokumen kependudukan bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan, serta strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen identitas resmi. Dengan demikian, penelitian masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam dalam pengembangan kebijakan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini, termasuk KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan semua responden yang telah berpartisipasi dalam studi ini.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Japami, W., & Eriyanti, F. (2019). Efektivitas Pelayanan Keliling Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 75-84.
- Mulianingsih, S. (2022). Transformasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Media Birokasi*, 4(1), 23-33.
- Nurrahman, A., Santoso, E.B., dkk. (2022). Efektivitas Aplikasi Sipinter dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1). 86-101.
- Pratama, A. P. (2022). Efektivitas program gerakan Indonesia sadar administrasi (GISA) dalam kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Dumai [Master's thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Rahmadanik, D. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Governance*, 11(1), 11-18.
- Sarifah, M. P. S., Supriyanti, N. W., & Wismayanti, K. W. D. (2021). Efektivitas Program AKU WARAS Sebagai Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Disdukcapil Kota Denpasar. *Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi FISIP*, 9(1), 1-12.
- Sugiono, Masruri, Estiasih, T., & Widjanarko, S. B. (2019). Optimization of extrusion-assisted extraction parameters and characterization of alginate from brown algae (*Sargassum cristaefolium*). *Journal of Food Science and Technology*, 56(8), 3687-3696.

- Sugiono, Masruri, Estiasih, T., & Widjarnako, S. B. (2019). Structural and rheological characteristics of alginate from *Sargassum cristaefolium* extracted by twin screw extruder. *Journal of Aquatic Food Product Technology*, 28(9), 944-959.
- Sujani, M.R. (2019). Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*. 5(4), 483-497.
- Tefa, G., & Nurhidayah, J. (2018). Efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan (Siak) dalam penetapan daftar pemilih tetap (Dpt) di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil)*.
- Wulandari, S., & Widowati, A. (2022). Implementasi Program Sipelandukilat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Wilayah Perbatasan Dan Pedalaman (Studi Kasus Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 11-24.
- Zulfikar, Zulfikar, Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). Kebijakan dan implementasi administrasi kependudukan di Indonesia.
- Ahmad, Muh. S., & Rahman, A. (2022). Public Service Innovation Population Administration Service System in Inland and Border Areas North Kalimantan (SIPELANDUKILAT). *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10926>
- Wulandari, S., & Widowati, A. (2023). Implementasi Program Sipelandukilat dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 11–24. Retrieved from <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/3179%0Ahttps://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/3179/1544>
- Sitti Hamida. (2015). Implementasi Program Sipelandukilat Smart Dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Masyarakat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Paper Knowledge – Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Dewi, D. P., Harjoyo, H., & Irawan, R. (2020). Pelayanan Proses Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik (KTP-el). *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 9(1), 35–51. <https://doi.org/10.35724/sjias.v9i1.2751>
- YADISAR, A. M. (2020). SISTEM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK – ELEKTRONIK (E-KTP). *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang.*, 18(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v18i1.392>